



## **Inovasi dan Kesetaraan : Pos sebagai Media Pemberdayaan Perempuan dalam Era Digital**

Ryani Abigail Silalahi

Universitas Padjadjaran, Indonesia; ryaniabigail@gmail.com

Windy Dermawan

Universitas Padjadjaran, Indonesia; windy.dermawan@unpad.ac.id

Meta Lestiana Devi

PT Pos Indonesia, Indonesia; meta.devi@posindonesia.co.id

| Dikirim: 26-06-2024 | Diterima: 16-01-2025 | Dipublikasikan: 31-01-2025 |

### **Keywords**

*Liberal  
Feminism,  
Women,  
Postal  
Service, and  
Digital  
Technologies.*

### **ABSTRACT**

*This research explores the role of digital technology in the postal services and how technology can help empower women. Digital transformation in the postal sector has changed the operation of postal service in the traditional sense by increasing efficiency, accuracy, and speed. Consequently, this research aims to demonstrate that digital technology is inclusive. That means anyone can operate it with the appropriate educational support. This research uses a qualitative method with an internet-based study. Then, Collecting data through indirect interviews and participant observation plays a vital role in helping researchers find answers regarding this problem. Research shows that applying digital technology in postal operational systems provides new opportunities for women to participate and develop in this industry. Overall, the researchers suggest emphasizing the importance of inclusive strategies and policies that support adopting digital technologies in postal services to ensure that women can experience the full benefits of digital transformation. Thus, technology is a tool to improve operational processes and a catalyst for empowering women in the postal sector.*

### **Kata Kunci**

*Feminisme  
Liberal,  
Perempuan,  
Pos, dan  
Teknologi  
Digital.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengeksplorasi kontribusi teknologi digital dalam industri layanan pos dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memberdayakan perempuan. Transformasi digital pada sektor pos telah mengubah cara operasi tradisional dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan layanan. Peneliti ingin menjelaskan bahwa teknologi digital bersifat inklusif dan dapat dioperasikan oleh siapapun dengan dukungan pendidikan yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan studi pustaka yang berbasis internet. Teknik mengumpulkan data melalui wawancara tak langsung dan observasi berperan serta membantu peneliti untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam sistem operasional bisnis pos memberikan peluang baru bagi perempuan untuk berpartisipasi dan berkembang dalam industri ini. Secara keseluruhan, peneliti menyarankan untuk menekankan pentingnya strategi inklusif dan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi digital dalam industri layanan pos untuk memastikan bahwa perempuan dapat merasakan sepenuhnya manfaat dari transformasi digital. Dengan demikian, teknologi bukan hanya alat untuk meningkatkan proses operasional layanan, melainkan juga berperan sebagai katalisator untuk pemberdayaan perempuan dalam sektor pos.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sudah dimulai sejak kelahiran peradaban manusia. Sejak zaman pra-sejarah sebelum mengenal tulisan, manusia sudah memiliki naluri untuk mencari cara dalam memudahkan pekerjaannya. Hal ini tampak dari penemuan alat-alat yang terbuat dari batu dan api. Dengan bantuan alat-alat tersebut, kehidupan manusia terbantu dan menjadi lebih mudah. Manusia semakin mampu menghadapi level kehidupan yang lebih kompleks. Setelah melalui masa yang panjang, penemuan mesin uap pada Revolusi Industri di Inggris menjadi awal mula perubahan secara masif dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Pertambahan jumlah manusia yang semakin banyak berbanding lurus pula dengan peningkatan kebutuhan hidup.

Revolusi Industri berkembang dengan cepat menghasilkan produk transportasi, listrik, komputer, hingga saat ini yang kita kenal *internet of things* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Revolusi Industri 4.0 dimulai sekitar abad ke-21, ditandai dengan proses kolaborasi antara teknologi siber dan kendali otomatis. Baik aktor negara maupun aktor non-negara bersama-sama beradaptasi dalam perubahan ini. Fokus perkembangan pada era industri 4.0 berbicara tentang jaringan internet yang memfasilitasi kebutuhan komunikasi, pendidikan, dan bahkan logistik. Seluruh perangkat komputer pada era revolusi industri 4.0 tersambung dengan jaringan internet. Perangkat di desain dengan lebih minimalis, praktis, kecil, dan ringan sehingga memberikan kemudahan untuk dibawa kemana-mana oleh manusia.

Perkembangan teknologi tersebut diiringi dengan penemuan baru dalam sains, robotik, dan sistem biometrik dalam perangkat elektronik lainnya. Seluruh teknologi tersebut memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia dewasa ini sehingga seluruh pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Persatuan Pos Dunia (Universal Postal Union, UPU) tidak ketinggalan dalam memberdayakan teknologi pada setiap aktivitasnya. Hal ini tampak pada perubahan produk layanan jasa yang diluncurkan oleh pos-pos di seluruh dunia. Di era baru kecerdasan buatan, UPU dan seluruh kantor pos di seluruh dunia juga menata ulang layanan pos generasi masa depan, model ekonomi, dan regulasinya dalam Persatuan Pos Dunia. Lembaga Pos yang tergabung dalam keanggotaan UPU menangkap peluang inovasi tersebut sebagai kesempatan untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan efisiensi sumber daya yang dibutuhkan dalam layanan posnya. Layanan komunikasi digital yang dapat dipercaya dan aman adalah kunci keberhasilan di masa depan dan menjadi semakin penting bagi layanan publik. Oleh karena itu, strategi pertumbuhan layanan pos juga merupakan strategi digitalisasi. Digitalisasi mengubah dunia bisnis dan pribadi secara mendasar dan cepat. Bermula dari surat menjadi parcel, pasar tradisional menjadi *e-commerce*, dan dari fisik menjadi digital (UPU, 2023).

Layanan pos, yang telah menjadi bagian integral dari infrastruktur sosial dan ekonomi, kini berada di ambang perubahan besar dengan masuknya teknologi digital dan kecerdasan buatan. Transformasi digital ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin dinamis dan terhubung dalam era globalisasi. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari operasional, manajemen logistik, hingga layanan pelanggan, semuanya didorong oleh kemajuan teknologi informasi. Kemajuan pesat dalam teknologi digital menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pos. Teknologi ini memungkinkan perusahaan pos untuk melacak paket secara *real-time*, mengoptimalkan rute pengiriman, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih personal dan responsif. Big data dan analitik memungkinkan analisis pola perilaku pelanggan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Perubahan tersebut tentunya membutuhkan transformasi multi-dimensi yang lebih inklusif.

Adapun transformasi digital memungkinkan akses yang lebih luas dan adil terhadap peluang pekerjaan dan pendidikan. Teknologi digital dapat menyediakan platform pelatihan *online* dan kursus yang dirancang khusus untuk memberdayakan perempuan, sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk bersaing dalam industri yang didominasi oleh laki-laki, termasuk teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta sektor pos. Sebagai contoh, UNESCO (2023) mencatat

pentingnya keterampilan digital untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi digital, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan gender. Sebagaimana *e-commerce* juga merupakan bagian integral dari industri pos, maka transformasi digital yang berangkat darinya juga diharapkan dapat menjawab keterbatasan sumber daya bisnis pos dalam melakukan pengembangan teknologi dalam kegiatan operasionalnya (Martínez-Peláez et al, 2023). Adanya *gap* atau kesenjangan dalam hal ini maka juga akan memberikan peluang bagi keikutsertaan peran perempuan dalam proses transformasi digital sektor pos yang semula bersifat manual dan didominasi laki-laki, khususnya di negara-negara berkembang.

Lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi dan stereotip tertentu akan memudahkan para tenaga kerja untuk menemukan peluang baru yang melahirkan inovasi dan kreativitas. Hal ini menjadikan keikutsertaan perempuan dalam proses transformasi digital pos bukan hanya menjadi syarat penting bagi kepemimpinan pasar pos, melainkan juga merupakan isu yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Persatuan Pos Dunia melihat bahwa memajukan transformasi digital melalui kesetaraan gender lebih dari sekadar memberikan kesempatan kerja yang setara. Partisipasi perempuan yang efektif dan setara dalam operasional pos sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, serta untuk menjadikan layanan pos sebagai aktor utama dalam memajukan pembangunan sosio-ekonomi yang berkelanjutan. Menggabungkan berbagai bakat dan keterampilan sangat penting untuk peningkatan dan modernisasi bisnis pos. Komitmen UPU terhadap promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik dalam jajaran sekretariat UPU maupun di sektor pos yang lebih luas, pertama kali dikonsolidasikan pada tahun 2021 melalui Persetujuan Kongres di Abidjan atas Resolusi C 10/2021, “Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di UPU dan sektor pos sedunia”. Inti dari komitmen adalah mendorong praktik perekrutan dan promosi yang adil, termasuk melalui penunjukan perempuan ke posisi kepemimpinan. Selain upaya internal, UPU juga secara aktif menjalin hubungan baik dengan entitas internasional, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk berbagi praktik terbaik dan mendorong inisiatif global yang mendukung kesetaraan gender secara lebih luas.

Dalam praktiknya, dengan mengadopsi teknologi digital, sektor pos dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan fleksibel. Misalnya, adopsi sistem kerja jarak jauh (*remote working*) dan fleksibilitas waktu kerja yang didukung oleh teknologi digital dapat membantu perempuan yang sebelumnya memiliki tanggung jawab keluarga untuk tetap produktif tanpa harus mengorbankan karir mereka. Hal ini penting dalam sektor pos, di mana pekerjaan tradisional seringkali membutuhkan kehadiran fisik yang konstan, memakan banyak waktu (*time consuming*), serta seringkali lebih bias terhadap pekerja laki-laki yang dianggap memiliki keunggulan biologis secara fisik (UNESCO, 2023). Demikian pada akhirnya permasalahan ini tidak hanya mendiskriminasi pekerja perempuan secara sosio-kultural dalam sektor pos, tetapi juga secara struktural dalam kebijakan perekrutan tenaga kerja yang cenderung bias atau subjektif terhadap berbagai pertimbangan yang bersifat seksis.

Teknologi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*, AI) dan analitik data dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengurangi bias gender dalam proses perekrutan dan promosi. Algoritma yang dirancang dengan hati-hati dapat membantu memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan kualifikasi dan kinerja, bukan berdasarkan stereotip gender. UNESCO (2023) menunjukkan bahwa AI memiliki potensi untuk meningkatkan kesetaraan gender dengan menyediakan analisis yang lebih objektif dan berbasis data (*data-driven*) untuk pengambilan keputusan.

Penulis menggunakan beberapa studi terdahulu sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian dan menyampaikan kebaruan dari penelitian ini, di mana penulis membahas terkait bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan pada sektor pos dalam era digital. Penulis membagi eksplorasi penelitian terdahulu kepada dua tipologi yaitu (1) peran perempuan dalam sektor pos dan (2) peran perempuan dalam era digital. Penulis menemukan bahwa dalam topik tipologi pertama yakni peran perempuan dalam sektor pos, terdapat sejumlah tulisan yang membahasnya, di antaranya Osmond (2013),

Kebijakan UPU dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (2024), dan Rao (2015). Penulis memahami bahwa terdapat beberapa peranan perempuan sebagai ujung tombak dalam memberikan layanan pos. Perempuan berkontribusi dalam membangun hubungan baik dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Di pusat layanan, perempuan memainkan peran kunci dalam mengelola interaksi dengan pelanggan melalui telepon, *email*, dan platform digital lainnya. Perempuan juga berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan yang mendukung inklusivitas dan kesetaraan gender dalam tempat kerja. Mereka mendorong kebijakan yang memastikan kondisi kerja yang adil dan mendukung kesejahteraan karyawan yang berfokus pada advokasi untuk hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dalam industri bisnis pos.

Saat ini, masih sulit ditemukan penelitian yang secara khusus dan mendalam membahas upaya memberdayakan perempuan pada era digital dalam sektor pos. Menurut laporan UPU yang bertajuk “Ekonomi Digital dan Aktivitas Pos Digital – Panorama Global”, studi laporan digital global atau regional tampaknya belum ada yang secara khusus dan mendalam membahas keterlibatan perempuan dalam sektor Pos. Meskipun transformasi digital terjadi dengan pesat di sebagian besar perekonomian, termasuk hal yang sama berlaku di sektor pos. Bahkan, pelayanan pos, sebagai penggerak keberlanjutan dan inklusif pertumbuhan ekonomi untuk semua, dapat menjembatani kesenjangan gender memberikan peluang usaha bagi perempuan dan juga bagi masyarakat. Namun, belum tampak bahasan lebih lanjut tentang pemberdayaan perempuan dalam upaya digitalisasi sektor pos. Oleh karena itu, penting untuk mendorong program digitalisasi pos dan menerapkan teknologi inovatif untuk meningkatkan manajemen bisnis, operasional, dan efisiensi produksi pos dengan melibatkan perempuan. Sebagai contoh, beberapa wilayah belum dapat dijangkau oleh layanan digital karena karakteristik sektor pos membutuhkan banyak proses yang masih bersifat manual sehingga memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar dan waktu pemrosesan yang lama, sehingga transformasi digital tidak dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Bisnis pos di beberapa negara berkembang sebagian besar merupakan usaha kecil dan menengah dengan sumber daya dan modal terbatas untuk berinvestasi di bidang teknologi, sehingga mereka tidak mampu mengembangkan solusi teknologi dan platform digital untuk mendukung produksi bisnis. Sektor pos dunia yang berada di bawah UPU harus terus mendapatkan proyek bantuan operasional, yang penting untuk mendukung negara-negara anggota dalam penelitian dan pengembangan platform digital yang memenuhi kebutuhan mereka.

Pada tipologi yang kedua, penulis menemukan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam peran perempuan dalam digitalisasi, di antaranya Wahyudi, D., & Kurniasih, N. (2021), OECD (2018), dan United Nations (2023). Penulis memahami bahwa pada era digital, pemberdayaan perempuan berbicara tentang proses dimana perempuan memiliki lebih banyak akses dan kendali terhadap teknologi digital sehingga memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Alat dan platform digital yang menawarkan peluang baru untuk pendidikan dan pekerjaan sebagai alat bantu yang memfasilitasi upaya pemberdayaan perempuan. Selama ini, representasi perempuan kurang terwakili dalam industri teknologi, baik dalam hal sektor bisnis maupun posisi dalam pemerintahan. Kurangnya keterwakilan ini dapat mempengaruhi perkembangan teknologi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan perempuan. Oleh karena itu, dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan organisasi internasional yang menerapkan kebijakan yang mendorong inklusi digital, seperti subsidi untuk perangkat digital, akses internet yang terjangkau, dan program pendidikan yang berfokus pada keterampilan digital bagi perempuan, upaya pemberdayaan perempuan dalam era digital dapat dilakukan secara maksimal. Dengan diperkenalkannya alat dan platform digital, peran tradisional telah berubah dan peluang baru bagi kemajuan dan pengaruh perempuan pun muncul. Pertumbuhan *telecommuting* telah menghilangkan hambatan historis bagi perempuan untuk memasuki dunia kerja dengan memungkinkan mereka mendapatkan akses yang setara dengan laki-laki terhadap teknologi digital. Perempuan diberdayakan oleh teknologi digital untuk meningkatkan pengetahuan, mendapatkan

partisipasi dan dukungan terkait tujuan tertentu, serta pertimbangan dalam membentuk opini dan kebijakan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemberdayaan perempuan pada perkembangan teknologi digital dalam layanan pos untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang terkait. Selain itu, penelitian ini juga akan fokus pada peran perempuan dalam transformasi digital layanan pos dan bagaimana mereka dapat diberdayakan melalui inisiatif dan kebijakan yang tepat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi teknologi digital dalam layanan pos serta strategi untuk pemberdayaan perempuan, industri pos dapat lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih inklusif.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yakni teoritis dan praktis. Dalam aspek teoritis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman atau informasi yang mendukung proses pengkajian isu terkait teori feminisme liberal ketika menyoroti eksistensi teknologi digital dalam pengelolaannya yang memberdayakan perempuan pada bisnis layanan pos. Sementara itu, dalam aspek praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan kontribusi kajian terkait bagaimana teknologi diberdayakan oleh perempuan dan analisisnya terhadap teori liberalisme dan feminisme dalam sektor bisnis layanan pos. Untuk membantu negara anggota, UPU mengatasi tantangan-tantangan dalam inovasi operator pos melalui beberapa penelitian dan evaluasi terhadap manfaat dan tantangan transformasi digital bagi negara-negara anggotanya untuk menjadi acuan dan dasar kebijakan mereka. Melalui penelitian ini, diharapkan bisnis pos dapat mengembangkan beberapa platform digital utama untuk disebarluaskan kepada operator pos yang ditunjuk guna membantu dalam upaya memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Industri pos juga mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kemungkinan dana dukungan transformasi digital untuk negara-negara berkembang dan kurang berkembang yang didukung oleh UPU.

Diharapkan makalah ini juga dapat memberikan pandangan baru yang dapat lebih lanjut mengembangkan dan menyokong kajian lainnya. Selain itu, untuk penulis sendiri, makalah ini diharapkan dapat dijadikan batu loncatan untuk terus mengembangkan diri dan pengetahuan terkait hubungan internasional. Segala kekurangan dalam makalah ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai peluang refleksi bagi penulis maupun pembaca.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### **Feminisme Liberal dalam Studi Hubungan Internasional**

Feminisme sebagai kajian hubungan internasional berkaitan dengan *the great debate III*, yakni postmodernisme. Feminisme dalam hubungan internasional menganggap bahwa hubungan internasional yang ada selama ini hanya berdasarkan sudut pandang dari kaum maskulin (laki-laki seluruhnya) sehingga terdapat pihak-pihak yang menawarkan dan menantang disiplin hubungan internasional yang ada pada saat ini untuk mulai merumuskan kembali teori yang ada dan bagaimana pemahaman global dapat lebih diperbaiki jika perhatian yang khusus diberikan terhadap isu kesetaraan bagi perempuan. Kaum feminis mengklaim bahwa dengan memperkenalkan analisis gender akan memberikan pengaruh yang berbeda pada sistem negara dan perekonomian global tentang kehidupan wanita dan pria. Kaum feminis mengkritik untuk memeriksa kembali beberapa konsep kunci hubungan internasional seperti kedaulatan, negara, dan keamanan. Teori feminisme dalam hubungan internasional melihat bahwa wanita dipandang sebagai sesuatu yang tidak hadir dalam kajian politik internasional.

Kaum feminis menginginkan agar kajian hubungan internasional dilihat dari cara pandang wanita dalam ekonomi global. Perjuangan tersebut membuahkan hasil, tampak pada kajian selanjutnya yang terbaru saat ini lebih banyak memfokuskan pada isu-isu yang sebelumnya kurang dibahas, antara lain prostitusi militer, pelayanan dalam negeri, pekerjaan di kantor pusat, yang semuanya banyak dilakukan

oleh wanita. Jika wanita ada dalam kinerja hubungan internasional, sifatnya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya *invisible* dan *gender subordination*. Melalui studi ini, para feminis berupaya untuk menunjukkan seberapa vital perempuan terhadap kebijakan luar negeri dari suatu negara, dan pemfungsian dari ekonomi global. Feminis mendefinisikan gender sebagai serangkaian sifat yang dibangun secara sosial yang menggambarkan bagaimana seharusnya pria dan wanita bertindak. Karakteristik seperti kekuatan, rasionalitas, maupun interdependensi mengarah pada maskulinitas. Sifat-sifat seperti kelemahan, emosional, relasional, terlindungi, privat semua diasosiasikan sebagai feminitas. Laki-laki dan perempuan tidak seimbang posisinya dengan negara, mereka hidup secara fungsinya masing-masing dengan nilai yang positif terhadap karakteristik maskulin daripada feminin.

Selanjutnya, poin teoritis dari liberalisme dalam hubungan internasional bertumpu pada konsep kemungkinan terjadinya kooperasi yang dapat membentuk urusan luar negeri, bukan hanya konflik (Jackson & Sorensen, 2013). Selain itu, konsep dalam liberalisme yang menjadi pembeda dengan teori aliran utama dalam Hubungan Internasional lainnya yaitu pandangan liberalisme terkait individu. Para liberal melihat individu dengan kaca mata yang optimistik. Ketika seorang individu menggunakan akalnyanya, sebuah kerja sama saling menguntungkan dapat dicapai. Pandangan liberalisme terkait individu ini juga termanifestasi dalam pandangannya terhadap negara-bangsa, perusahaan, dan institusi lainnya dalam sistem internasional. Kemungkinan terjadinya kerja sama ini membuka peluang untuk mengakhiri sebuah perang. Optimisme dari pandangan liberal dilihat cukup terikat dengan berkembangnya negara-bangsa modern. Menurut Heywood (2011), tema utama yang dibawa oleh liberalisme ke dalam Hubungan Internasional adalah terkait keseimbangan atau harmoni antara kepentingan-kepentingan yang senantiasa berkompetisi. Dalam liberalisme, seorang individu ataupun sebuah kelompok dapat mengejar kepentingannya masing-masing tetapi sebuah keseimbangan antara kepentingan-kepentingan tersebut akan tetap terealisasi dan terjadi. Di dalam liberalisme sendiri terdapat beberapa aliran cabang: liberalisme interdependen, liberalisme republik, dan liberalisme institusionalis. Namun, berkenaan dengan kajian terkait pos internasional, penulis ingin membahas lebih dalam tentang liberalisme interdependen dan institusionalis.

Liberalisme interdependen didasari gagasan-gagasan terkait perdagangan dan hubungan ekonomi. Pemikiran terkait liberalisme interdependen dapat dilihat bermula dari lahirnya liberalisme komersial pada abad ke-19. Pemikiran tersebut dikembangkan dari pemikiran ekonomi klasik David Ricardo, Richard Cobden, dan John Bright ketika para pemikir tersebut mencanangkan gagasan terkait kepercayaan terhadap perdagangan bebas. Kepercayaan akan perdagangan bebas didasari anggapan bahwa perdagangan bebas dapat memberikan keuntungan ekonomi. Contoh keuntungan tersebut yaitu dapat memberikan sebuah negara-bangsa keunggulan komparatif yang bersumber dari spesialisasi produksi barang dan/atau jasa yang sesuai dengan kapasitas negara-bangsa tersebut. Kemudian, perdagangan bebas juga dilihat mengarahkan negara-bangsa untuk menjalin hubungan ekonomi yang bersifat interdependen. Karena hubungan interdependen tersebut, konflik internasional menjadi suatu hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Cobden dan Bright lebih lanjut menggarisbawahi sifat perdagangan bebas yang dapat menyatukan individu atau kelompok dari berbagai macam latar belakang ke dalam suatu hubungan yang disebut '*bonds of eternal peace*'. Selain itu, liberalisme interdependen menunjukkan sisi positifnya dengan memastikan individu ataupun kelompok dari latar belakang yang berbeda dapat disatukan karena memiliki nilai atau prinsip komersial yang sama.

Aliran cabang liberalisme institusionalis melihat organisasi internasional sebagai mekanisme eksternal yang dapat membatasi ambisi dari negara-negara bangsa yang berdaulat. Hal ini didasari gagasan bahwa '*analogi domestik*' yang menunjukkan bahwa wawasan terkait politik internasional dapat diperoleh melalui refleksi terhadap struktur politik domestik. Memperhitungkan teori kontrak sosial sebagaimana dikembangkan oleh Hobbes dan Locke, analogi domestik menggarisbawahi sifat konstruksi dari kekuatan berdaulat dapat menjaga masyarakat dari kekacauan '*state of nature*'. Apabila ada anggapan dalam politik domestik bahwa tatanan politik hanya dapat diberlakukan dari '*atas*' maka

hal yang sama dapat termanifestasi pada politik internasional. Anggapan tersebut mendasari terbentuknya hal-hal seperti hukum internasional yang dalam pemikiran Woodrow Wilson, dapat mengubah politik internasional yang tadinya merupakan 'hutan' menjadi sebuah 'kebun binatang'. Realisasi dari aliran liberalisme institusionalis pertama terjadi dengan terbentuknya Liga Bangsa-bangsa, walaupun pada akhirnya runtuh karena banyak kekurangannya. Kemudian, terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa lebih lanjut menetapkan gagasan-gagasan liberalisme institusionalis dalam sistem internasional.

Feminisme liberal kemudian lahir untuk menjelaskan konstitusi demokratis mengakui seseorang tidak dapat di diskriminasi berdasarkan gender. Feminisme liberal secara historis sangat menekankan kesetaraan hukum, yang hampir sepenuhnya dicapai di beberapa negara Barat (Cottais, 2021). Feminisme liberal masih bertahan karena kesetaraan gender yang ideal tidak selalu berarti kesetaraan yang diartikan secara harfiah bahwa kodrat perempuan disamakan dengan laki-laki dalam segala hal. Kesetaraan yang diutamakan dalam konsep feminisme liberal adalah perempuan kini dapat mewujudkan potensi mereka dengan cara lain selain menjadi ibu atau pasangan berkat upaya kaum feminis di sektor tenaga kerja. Feminis liberal menekankan bahwa meskipun perempuan harus memasuki dunia kerja, masih terdapat ketidakadilan di dunia kerja yang perlu dicari bersama solusinya. Hal ini mengarah pada fenomena yang disebut segregasi seksual, di mana laki-laki dan perempuan didistribusikan secara berbeda berdasarkan pekerjaan mereka, yang juga mempengaruhi pendapatan mereka.

Dalam industri seperti penjualan dan jasa, pendidikan, keperawatan, perawatan pribadi, penginapan, dan catering, ditunjukkan bahwa perempuan mempunyai jumlah perwakilan yang dominan. Sebaliknya laki-laki lebih cenderung bekerja di bidang manajemen, ilmu pengetahuan alam, transportasi, konstruksi, pelayanan publik, kehutanan, ataupun sektor profesional yang lebih menjanjikan. Perempuan kurang terwakili dalam posisi paling bergengsi dalam hierarki, seperti CEO, wakil presiden, direktur, dan kepala negara, tetapi perempuan lebih banyak menempati posisi yang secara tradisional didominasi laki-laki seperti hukum, akuntansi, jasa notaris, kedokteran hewan, dan kedokteran.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menjelaskan tentang nilai-nilai kemanusiaan, seperti pemeliharaan martabat dan kehormatan manusia. Seluruh warga negara dunia harus berkomitmen untuk melaksanakan deklarasi tersebut setelah diterbitkan. Pentingnya deklarasi ini diakui dalam mengatasi isu-isu gender, ras, kelas, dan isu-isu lain yang secara historis meremehkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, sebagaimana tercantum pada artikel pertama deklarasi tersebut, "Semua orang dilahirkan mandiri dan mempunyai martabat dan hak yang sama". Manusia harus berinteraksi satu sama lain dalam semangat persaudaraan karena mereka memiliki akal dan hati nurani (Majelis Umum PBB, 1948). Konsep yang ingin dipertegas oleh pencetus teori feminisme liberal mempromosikan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai konteks, seperti tempat kerja, kehidupan bermasyarakat, politik, pernikahan, kesehatan, dan kehidupan keluarga.

Lebih jauh lagi, feminisme liberal membangun prinsip fundamental tentang kesetaraan dan kebebasan bagi kedua jenis kelamin dengan menekankan identitas bersama antara laki-laki dan perempuan (Tong, 2009). Mary Wollstonecraft (1759–1799) adalah pelopor feminisme liberal, sebagaimana dibuktikan dalam artikelnya "A Vindication of the Rights of Women" menjelaskan tentang kerugian psikologis dan finansial yang dialami perempuan ketika mereka terpinggirkan dan bergantung pada laki-laki. Wollstonecraft menegaskan bahwa setiap manusia harus memiliki hak istimewa yang dijamin untuk bertindak sesuai dengan nalar, yang bergantung pada status sosial tertentu dan tidak adanya tuan yang menindas (Maulana dkk, 2021).

### **Digital Gender Gap**

Kesenjangan gender digital (*digital gender gap*) mengacu pada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, penggunaan, dan manfaat teknologi digital. Kesenjangan ini merupakan permasalahan penting yang mencerminkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Perempuan seringkali memiliki akses yang lebih sedikit terhadap perangkat digital dan internet dibandingkan laki-laki, hal ini disebabkan oleh kesenjangan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, dan budaya. Misalnya, UNESCO (2023) melaporkan bahwa secara global, hanya 48% perempuan yang memiliki akses terhadap internet dibandingkan dengan 58% laki-laki, hal ini menunjukkan kesenjangan digital yang terus-menerus terjadi. Bahkan ketika perempuan mempunyai akses terhadap teknologi digital, pola penggunaannya seringkali berbeda dengan laki-laki. Perempuan lebih cenderung menggunakan internet untuk tujuan sosial dibandingkan untuk kegiatan profesional atau pendidikan sehingga dapat membatasi peluang mereka untuk mencapai kemajuan ekonomi. Disparitas penggunaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya literasi digital dan norma-norma sosial yang menghambat perempuan untuk menekuni bidang yang berhubungan dengan teknologi (Kambandu & Manduwi, 2022).

Selain itu, perempuan cenderung memperoleh lebih sedikit manfaat ekonomi dari teknologi digital. Mereka kurang direpresentasikan dalam pekerjaan teknologi bergaji tinggi dan kewirausahaan digital, sehingga memperburuk kesenjangan ekonomi yang sudah ada. Demikian untuk mengatasi masalah ini, diperlukan suatu intervensi yang ditargetkan untuk meningkatkan literasi digital perempuan dan akses terhadap teknologi. Perlu diketahui juga bahwa kesenjangan gender digital juga mencakup rendahnya keterwakilan perempuan di sektor teknologi dan inovasi, yang semakin membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan manfaat dari transformasi digital (Martínez-Peláez et al, 2023).

Adapun hambatan budaya dan sosial yang berkontribusi terhadap kesenjangan gender digital sangatlah besar. Stereotip gender dan ekspektasi masyarakat seringkali menghalangi perempuan untuk terlibat sepenuhnya dengan teknologi digital. Hambatan-hambatan ini menciptakan lingkungan yang mengintimidasi sehingga menghambat perempuan untuk memasuki dan berkembang di sektor teknologi. Masalah ini lazim terjadi di seluruh dunia, dan penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekspektasi budaya secara signifikan mempengaruhi partisipasi perempuan dalam transformasi digital (Kambandu & Manduwi, 2022; Martínez-Peláez et al, 2023).

Selanjutnya kesenjangan gender digital dapat dikaitkan dengan teori konstruksi sosial dan teknologi dan masyarakat atau *social construction of technology* (SCOT). Teori SCOT berpendapat bahwa teknologi tidak berkembang dalam ruang hampa tetapi dibentuk oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi serta interaksi antara kelompok berbeda dalam masyarakat. Perspektif ini membantu memahami kesenjangan gender digital dengan menyoroti bagaimana norma-norma sosial dan dinamika kekuasaan memengaruhi akses, penggunaan, dan dampak teknologi digital terhadap laki-laki dan perempuan secara berbeda. Selanjutnya teori SCOT menekankan bahwa perkembangan teknologi bergantung pada konteks sosial di mana perkembangan tersebut terjadi. Di banyak masyarakat, norma dan stereotip gender sangat mempengaruhi desain dan penyebaran teknologi. Misalnya, persepsi bahwa teknologi dan teknik adalah bidang yang didominasi laki-laki dapat membuat perempuan enggan mengejar karir atau pendidikan di bidang tersebut sehingga menyebabkan ketidakseimbangan gender dalam profesi yang berhubungan dengan teknologi (Bijker, 1995; Wajcman, 2010). Bias budaya ini berkontribusi terhadap kesenjangan gender digital dengan membatasi partisipasi perempuan dalam penciptaan dan pemanfaatan teknologi digital.

Beberapa upaya yang dapat menjembatani kesenjangan gender digital mencakup inisiatif pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang bertujuan untuk memberikan perempuan akses yang lebih besar terhadap teknologi digital dan meningkatkan keterampilan digital mereka. Program yang berfokus pada pelatihan literasi digital bagi perempuan, khususnya di daerah pedesaan dan daerah tertinggal sangatlah penting. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya memberdayakan perempuan namun juga

berkontribusi pada tujuan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih luas (Kambandu & Manduwi, 2022).

Oleh karena itu, kesenjangan gender digital adalah permasalahan multifaset yang memerlukan strategi komprehensif untuk mengatasinya. Berbagai upaya seperti meningkatkan akses terhadap teknologi, meningkatkan literasi digital, dan menciptakan kebijakan inklusif merupakan langkah-langkah penting untuk menjembatani kesenjangan gender digital dengan tujuan akhir untuk memastikan bahwa perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari transformasi digital sehingga mendorong kesetaraan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif.

## **METODE RISET**

Menurut Kerlinger (1986) dalam Mevia (2022), desain penelitian berfungsi sebagai rencana dan struktur penelitian yang disusun sehingga memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk menjadi cara mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana realita dilihat sebagai unsur dengan berbagai dimensi dan dipandang sebagai kesatuan yang utuh dan dinamis. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data deskriptif mengenai perilaku dan fenomena yang dikaji secara menyeluruh. Penjelasan melalui deskripsi data dengan menggunakan metode kualitatif akan mengkaji latar belakang dilaksanakannya suatu penelitian, pembentukan opini, serta perkembangan minat dan kebiasaan subjek penelitian (Fadli, 2021). Dengan cara ini, penulis mampu mengidentifikasi permasalahan secara utuh dan mendalam. Sesuai temuan Mulyana (2008) dalam Fiantika (2022), penelitian dengan fokus kualitatif akan lebih bermanfaat dalam menjawab pertanyaan 'bagaimana' dan menarik serta kesimpulan atau tanggapan terhadap hipotesis yang dirumuskan. Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa penulisan pada artikel ini sudah tepat menggunakan metode kualitatif.

Dalam kajian suatu fenomena tertentu, metode kualitatif juga digunakan untuk mengkaji gagasan, persepsi, maupun pemahaman terhadap proses suatu peristiwa (Moleong, 2013). Hal ini sangat membantu penulis karena tujuan penelitian adalah untuk menyelidiki suatu fenomena dengan menafsirkan data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan. Meski prosedurnya tetap dilakukan secara metodis, namun cara ini juga menawarkan fleksibilitas (Fiantika, 2022). Tingkat analisis penulis sangat cocok untuk menulis penelitian ini karena mengacu pada pengetahuan bangsa di organisasi internasional. Dengan demikian, penulis menemukan bahwa pendekatan deskriptif dan interpretatif bermanfaat dalam memberikan penjelasan atas data yang dikumpulkan (Fadli, 2021). Menurut metode penelitian kualitatif, penulis menggunakan data non-numerik yang dapat diteliti secara dekat dan ditafsirkan secara tajam dari berbagai sudut. Selain itu, penulis menganalisis informasi tersebut sehingga data yang digunakan akan ditafsirkan sesuai dengan tingkat pemahaman penulis. Penulis kemudian memberikan penjelasan mengenai analisis data yang dilakukan beserta kesimpulan yang diambil secara deduktif untuk memenuhi tujuan penelitian.

Seluruh data yang digunakan dalam proses pengkajian makalah ini diambil dari studi historik dan pustaka yang tersedia dalam berbagai macam platform internet. Kredibilitas dan reliabilitas data yang diperoleh dipastikan dengan hanya mengambil data dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, tesis, dokumen resmi, dan sumber lain sejenisnya. Pengambilan data juga terlepas sumber yang merupakan kontribusi personal dari individu-individu dengan biasanya masing-masing seperti halnya pada *blogspot* dan *wikipedia*. Terlebih, untuk memastikan reliabilitas dari data yang diperoleh, penulis juga melakukan triangulasi data yaitu proses penggalian informasi menggunakan berbagai macam sumber sehingga data yang diperoleh diharapkan bersifat menyeluruh dan tidak terpengaruh bias apapun. Penelitian ini dilakukan pada saat peneliti melakukan kegiatan magang sehingga banyak

melibatkan proses pengumpulan data dengan teknik observasi berperan serta serta wawancara tidak langsung terhadap pegawai di instansi magang. Hal ini dikarenakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah. Observasi berperan serta dan wawancara tak langsung sangat efektif untuk studi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, ketika interaksi langsung dan pengalaman subjek menjadi pusat perhatian penelitian (Hasanah, 2016).

Validitas kualitatif data yang digunakan dalam penelitian ini diperlukan karena penelitian menggunakan metode kualitatif. Hal ini dilakukan untuk memverifikasi kebenaran informasi sehingga penelitian dapat dilakukan secara akurat dan menghasilkan kesimpulan yang mendukung tujuan penelitian (Fadli, 2021). Validitas data mengkaji metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan kebenaran temuan penelitian dimulai dari hipotesis awal penulis dan berlanjut hingga pembaca maupun penulis dapat memahaminya. Selain itu, reliabilitas kualitatif mengacu pada konsistensi data sebagai alat penelitian sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya. Langkah validitas dan reliabilitas ini, akan menurunkan bias peneliti dan meningkatkan transparansi dari instrumen penelitian yang telah ditentukan. Penulis menggunakan teknik yang disebut dengan triangulasi data, yaitu proses penggabungan informasi dari berbagai sumber untuk memverifikasi keakuratan temuan penelitian. Penulis dapat menentukan secara pasti apakah informasi tersebut terkini dengan mengumpulkan data menggunakan berbagai sumber dan metode. Topik penelitian juga dapat dibatasi hanya mencakup data terkait. Untuk menjamin keabsahan penelitian, penulis memastikan data yang digunakan valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemberdayaan Perempuan dalam Sektor Bisnis Pos

Teknologi digital telah menjadi katalisator penting dalam transformasi sektor bisnis pos. Dengan kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar, teknologi di era digital menghadirkan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan logistik, dan memperbaiki layanan pelanggan. Melalui beberapa konferensi yang diselenggarakan, UPU menekankan perlunya kunci utama yang dapat diandalkan untuk mendukung perkembangan terkini dalam *e-commerce* dan digitalisasi. Kunci tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memastikan layanan berkualitas tinggi dan relevansi pos sebagai mitra yang menarik dalam rantai pasokan, terutama di tengah meningkatnya keterlibatan dengan sektor pos yang lebih luas. Waktunya telah tiba untuk memperdalam tren ini dan mengintegrasikan teknologi mutakhir untuk menghasilkan informasi data alamat akurat yang tersedia secara internasional untuk digunakan oleh pelanggan pos.

UPU secara aktif mendukung peranan wanita dalam proses inovasi pos dunia dari masa ke masa. Hal tersebut tampak pada beberapa peran cemerlang wanita pada kantor-kantor pos di seluruh dunia. Hanadi Al-Tayeb, merupakan seorang wanita pertama yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Jordan Post, telah menjadi teladan dedikasi dan kepemimpinan dalam layanan pos selama lebih dari dua puluh tahun (UPU, 2024). Beliau mencetuskan inisiatif pembayaran pos dan layanan keuangan digital, serta mendorong pengembangan layanan pos di tingkat regional dan global untuk mendukung pengembangan usaha bagi perempuan, yang menyediakan platform bagi perempuan lokal untuk menunjukkan keterampilan mereka.

43 dari 100 pegawai di Correos de México, kantor pos di Meksiko memiliki tenaga kerja perempuan (UPU, 2024). Jumlah minoritas tersebut bersama-sama memperjuangkan pemenuhan hak dalam mencapai kesetaraan gender melalui pengembangan profesional dan pemenuhan kebutuhan khusus pelanggan perempuan. Sebagai bagian dari inisiatif ini, pegawai pos perempuan berbagi pengalaman mereka dalam mengatasi tantangan di sektor yang didominasi laki-laki, mendorong perubahan positif dalam sejarah 400 tahun berdirinya operator pos di Meksiko. Dari Azerbaijan hingga Australia, pengaruh perempuan dalam layanan pos terus dipertahankan dari generasi ke generasi (UPU, 2024).

Masa jabatan Hajar Isababayeva selama 64 tahun di Azerpost menjadi simbol komitmen dan ketangguhan bentuk kepemimpinan seorang perempuan di sektor pos (UPU, 2024). Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Mary Ellen Cuper sebagai kepala kantor pos Aborigin pertama di Australia senantiasa diteruskan melalui pelatihan dan pemberdayaan pemimpin perempuan di masa yang akan datang.

Kontribusi berharga perempuan dalam pengembangan layanan pos terlihat jelas di Layanan Pos Seychelles, yang sebagian besar dipimpin oleh perempuan. Dengan 75% dari tenaga kerjanya terdiri dari perempuan, termasuk dalam posisi manajemen puncak, menjadi simbol inklusivitas gender terhadap posisi kepemimpinan di sektor pos Seychelles (UPU, 2024). Selain itu, di Malaysia, tim peninjau keamanan pos yang seluruhnya terdiri dari perempuan menunjukkan komitmen mereka untuk menjamin keamanan komunikasi internasional. Pos Malaysia menerapkan keahlian dan ketelitian tenaga kerja dalam menyoroti peran penting perempuan dalam menjaga standar keamanan di sektor pos. Pemberdayaan perempuan dalam digitalisasi melibatkan sejumlah langkah yang bertujuan untuk memberikan peran yang lebih aktif dan signifikan bagi perempuan dalam mengadopsi, mengembangkan, dan mengambil manfaat dari teknologi digital (UPU, 2024).

Saat ini, UPU mengusahakan pemberdayaan wanita dalam era digitalisasi. UPU secara aktif merayakan hari wanita internasional dan membuat berbagai kampanye untuk menyuarakan kesetaraan gender. Hal tersebut dapat dilihat melalui upaya Masahiko Metoki, Direktur Jenderal UPU yang juga merupakan seorang Pejuang Gender Internasional, yang memperbarui komitmen UPU terhadap kesetaraan gender melalui jaringan pos globalnya, memastikan layanan inklusif dan memberdayakan perempuan dalam *e-commerce* untuk kemandirian finansial. UPU senantiasa memastikan bahwa perempuan memiliki platform yang setara agar suaranya didengar di forum UPU dan pandangannya dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan UPU untuk membangun masa depan yang adil melalui sektor pos. Kampanye #SheStamps dan #PostalWomen merayakan perempuan dari berbagai latar belakang yang telah memberikan kontribusi penting dalam sejarah, dengan 19 negara anggota UPU berbagi 66 edisi perangko yang berkesan terkait kesetaraan gender, khususnya peran perempuan yang menakjubkan (UPU, 2024).

Operator Pos Perancis, La Poste, telah menyelenggarakan penghargaan #FemmesduNumérique Coups de Coeur, yang ditujukan bagi pengusaha perempuan yang memiliki proyek digital inovatif atau solusi layanan digital. Penghargaan ini tentunya akan mendorong perempuan untuk merealisasikan proyek yang ingin dikembangkan, dengan memberikan kesempatan bagi ide-ide tersebut agar terlihat dan dengan mendapatkan pendanaan pertama. Manfaat utama yang didapatkan oleh operator pos Perancis ketika menjalankan program penghargaan semacam ini adalah bahwa perusahaan rintisan yang menang bisa menjadi mitra perusahaan di masa depan. Salah satu program lainnya adalah proyek akselerator bisnis La Poste, yang disebut dengan French IoT. Program ini membantu mereka dalam peluncuran dan pertumbuhan pasar. Program French IoT juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti halnya penghargaan Coups de Coeur. Berkat penerapan tujuan kesetaraan ini, kami telah meningkatkan jumlah *startup* yang didirikan oleh perempuan dari 9% menjadi 50% (UPU, 2022).

Isu pemberdayaan perempuan dalam digitalisasi ini khususnya akan memainkan peran inti di masa depan teknologi informasi di seluruh kantor pos di dunia. Dengan menggunakan otomatisasi proses robotik, kecerdasan buatan, dan model bahasa besar, layanan pos akan menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, isu utama bagi bisnis pos secara keseluruhan adalah keamanan informasi karena kepercayaan adalah pintu gerbang menuju dunia digital. Oleh karena itu, operator pos mengupayakan keamanan siber yang mengutamakan perlindungan terhadap seluruh informasi personal pengguna. Hal tersebut tampak pada bagaimana upaya yang dilakukan Swiss Post telah mempekerjakan lebih dari 200 pakar keamanan siber. Investasi dalam mengakuisisi kepemilikan saham mayoritas di terreActive spesialis keamanan siber yang berbasis di Aargau dan perusahaan Hacknowledge yang berbasis di Vaud,

merupakan upaya krusial bagi upaya keamanan pos. Dengan meningkatnya ancaman siber yang menyasar layanan pos secara global, sangatlah penting bagi industri pos untuk bersama-sama menilai risiko, berbagi praktik terbaik, dan mencari solusi inovatif untuk menjaga integritas dan ketahanan jaringan pos. Melissa Hathaway, pakar kejahatan dunia maya, spionase dan keamanan, kebijakan Internet dan infrastruktur serta Presiden Hathaway Global Strategies LLC, memberikan gambaran global lanskap keamanan siber saat ini. Ekonomi digital menyumbang 15% dari perekonomian global dan 8,4 triliun USD telah hilang akibat aktivitas kejahatan dunia maya, Hathaway melihat bahwa tingkat urgensi menetapkan keamanan siber sebagai bagian dari keseluruhan strategi operasional dan bisnis pos karena kemampuan aplikasi dan sistem untuk secara aman dan otomatis bertukar data tanpa memandang batas-batas geografis, politik, atau organisasi jaringan pos global. Investasi dalam pelatihan dan pelatihan ulang staf akan menjadi kunci untuk memitigasi pelanggaran keamanan siber, dimana 88% di antaranya disebabkan oleh kesalahan manusia.

Menyediakan program pelatihan khusus untuk perempuan dalam keterampilan mengoperasikan teknologi, seperti *machine learning*, analisis data, dan pengembangan algoritma dapat menjadi solusi ideal yang kemudian memberikan kesempatan untuk membuka peluang karir baru dalam bidang teknologi bagi perempuan di sektor pos. Industri keamanan siber dan pusat teknologi pos yang didirikan oleh UPU menyelami lebih dalam ancaman umum yang dihadapi dalam pemberdayaan teknologinya pada perempuan, berusaha mencari jalan terbaik untuk mitigasi dan peluang kolaborasi agar operator pos masing-masing negara anggota memahami cara melayani pelanggan dengan tetap menggunakan empati. Empati adalah karakteristik yang cenderung lebih natural pada wanita. Bekerja di pos berbicara tentang menjadi garda terdepan pelayanan bagi komunitas, secara lokal dan global. Sudah waktunya untuk menghilangkan persepsi yang salah bahwa sektor pos adalah sektor yang didominasi laki-laki. Ada ruang dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat. Pos juga merupakan salah satu sektor bisnis yang sedang mengalami transformasi besar akibat digitalisasi. Sektor pos dengan segala perubahan yang terjadi di dalamnya bergerak sebagai pilar utama layanan logistik pada masyarakat.

Kantor pusat UPU yang bermarkas di Berne, Swiss mengutamakan inovasi dalam memanfaatkan kekuatan transformatif kecerdasan buatan untuk mengatasi beberapa tantangan paling mendesak dan membuka peluang baru di sektor pos dan sektor lainnya karena Berne adalah pusat internasional untuk industri pos dan pengiriman. Otomatisasi proses robotik (*robotic process automation*, RPA) merujuk pada proses mengotomatiskan tugas dengan bantuan robot perangkat lunak. Lebih dari 80 proses RPA telah diperkenalkan di Swiss Post. Salah satu contoh nyata tampak pada kondisi dimana robot memulai kontak dengan pelanggan secara digital, mengumpulkan informasi yang diperlukan melalui situs daring dan melampirkannya ke kiriman sebagai PDF. Pelanggan yang memiliki barang untuk dikirimkan juga menerima bantuan melalui kecerdasan buatan, yang telah sebelumnya telah melalui berbagai tahap uji coba menggunakan lebih dari 8 juta kiriman surat dan parsel sebagai objek penelitiannya. Untuk pemasok *e-commerce* besar, robot dapat membedakan berbagai jenis item, membuat keputusan, menganalisis data, melacak kiriman, dan berkomunikasi dengan pelanggan yang menunjukkan sebuah solusi otomatisasi yang sangat mengurangi waktu penyelesaian.

Oleh karena itu, sektor pos sangat mendukung pemberdayaan perempuan dalam proses digitalisasi sektor pos di seluruh dunia. UPU yang menaungi seluruh operator pos negara anggotanya hadir untuk menjadi mediator dan sarana diskusi bersama agar proses pemberdayaan perempuan pada sektor pos bisa dilakukan secara maksimal. Kritik yang dikemukakan kaum feminis prihatin dengan cara-cara dimana masyarakat secara normal melemahkan perempuan dalam ekonomi, politik, dan sosial budaya. Aliran pemikiran feminisme mengkaji bagaimana beberapa komponen budaya kita pada dasarnya patriarki (didominasi laki-laki) dan berupaya mengungkap seksisme dalam literatur tentang perempuan. Banyak dari upaya perkembangan teknologi yang memberdayakan perempuan berada di garis depan dalam upaya berkelanjutan untuk menghubungkan tatanan global. Hal ini paling jelas terlihat di sektor

pos di mana teknologi memungkinkan operator pos menikmati manfaat yang memudahkan pekerjaan. Kecerdasan buatan juga menjangkau bidang lain seperti gudang digital dan penciptaan layanan pos yang terpercaya dan tepat waktu. Industri pos benar-benar hidup di dunia yang penuh transformasi dan semakin besarnya peluang bisnis untuk mencapai agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang teknologi mempunyai peran sangat berharga. Persatuan Pos Dunia (UPU) dengan bangga mendukung operator pos di berbagai tempat untuk menyambut perkembangan ini, sambil terus meningkatkan efektivitas dan efisiensinya.

### **Analisis Eksistensi teknologi digital dan pemberdayaan perempuan dengan Teori Feminisme Liberal**

Teori feminisme memiliki ranah bahasan dalam memahami dan mengatasi isu-isu ketidaksetaraan gender. Beberapa perspektif utama dalam feminisme yang relevan untuk analisis ini meliputi feminisme liberal. Penulis melihat bahwa perspektif ini menawarkan pandangan yang unik tentang bagaimana teknologi digital dapat memberdayakan perempuan. Dari sisi kesempatan dan akses, feminisme menekankan pentingnya memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada perempuan di semua bidang kehidupan, termasuk teknologi digital. Teknologi digital dapat memberdayakan perempuan dengan menyediakan akses ke pendidikan, peluang kerja, dan persaingan global. Selain itu, feminisme menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan melalui kebijakan dan reformasi. Dalam sektor bisnis layanan pos, kebijakan dan reformasi yang memastikan kesetaraan gender dalam akses teknologi, seperti program pelatihan khusus untuk perempuan di bidang pos penting untuk dilakukan seiring dengan tuntutan persaingan industri layanan pos di tatanan global.

Pos dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah yang masih menghambat perkembangan industri *e-retailing*. Bisnis pos harus menunjukkan kepada pengguna jasanya bahwa layanan logistik mereka sebagai pihak ketiga yang terpercaya dan jaringan luas mereka untuk mendapatkan manfaat dari *e-commerce*, yang diperkirakan akan meningkat secara maksimal dalam beberapa tahun ke depan. Pos hadir sebagai distributor penghubung antara konsumen dan produsen sehingga harus bekerja dengan cepat tanggap dalam memenuhi permintaan produsen dan konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 20% populasi dunia, atau setara dengan 1,4 miliar orang, sudah menggunakan internet, dan diperkirakan 90% penjualan akan dipengaruhi oleh internet pada tahun mendatang. Inisiatif operator pos negara-negara yang berada dalam naungan UPU, bertujuan menunjukkan identitas aman dan terpercaya pada sektor pos di seluruh dunia di internet sehingga haruslah didukung oleh seluruh negara anggota.

Kehadiran teknologi digital yang telah mengguncang dunia demikian dapat dianalisis dengan teori liberalisme sebagai teori Hubungan Internasional yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan bagi setiap individu serta determinasi untuk menentukan nasibnya sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Jackson dan Sorensen (1999) dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Relations*, salah satu asumsi dasar dari teori liberalisme adalah eksistensi peran negara dalam menjamin kebebasan individu. Pada asumsi tersebut, negara dilihat sebagai fasilitator kebebasan yang dimiliki oleh individu. Asumsi ini pun sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh John Locke bahwa negara ada untuk menanggung kebebasan warganya dan tidak seharusnya *the pursuit of happiness* mengalami intervensi. Sehingga negara bukanlah satu-satunya aktor yang menjadi determiner dalam sebuah fenomena internasional. Negara dianggap sebagai bentuk perwakilan dari aktor individu dan kelompok. Dengan demikian, aktor utama teori liberalisme merupakan kedua subjek tersebut. Fenomena internasional pun dipercaya sebagai produk interaksi para aktor, individu, dan kelompok.

Ketika negara tidak mampu untuk merepresentasikan kepentingan terbaik rakyatnya, maka berdasarkan teori liberalisme negara tersebut dianggap gagal dalam mencerminkan aktor individu dan kelompok sebagai penyusun utamanya. Penekanan pada aktor individu dan kelompok dalam perspektif

liberalisme membuat pandangan bahwa fenomena hubungan internasional tak lebih dari produk interaksi para aktor individu dan kelompok. (Russett, 2013). Liberalisme sebagai perspektif mengedepankan individu dan aktor non-negara dalam memainkan perannya yang disebabkan oleh kepercayaan terhadap kecenderungan negara untuk bersikap dominan sebelum terjadinya *distribution of power* (pembagian kekuasaan) seimbang dengan para aktor lainnya. Kenyataan ini contohnya bisa dilihat dari adanya pergeseran pada bentuk-bentuk diplomasi lama (*old diplomacy*) yang bersifat sangat rahasia dengan meminimalisasikan peran rakyat dalam hubungan internasional menuju diplomasi yang lebih terbuka atau dikenal sebagai *new diplomacy* (Dunne et al, 2013). Di samping jaminan oleh negara atas kebebasan individu yang merupakan salah satu asumsi dasar teori liberalisme sebagaimana dikemukakan oleh Jackson dan Sorensen (1999), nilai-nilai yang diusung oleh teori liberalisme seperti nilai kebebasan, nilai kerja sama, nilai kemajuan, serta nilai kesejahteraan juga penting untuk diberikan konsiderasi dalam analisis ini. Penulis melihat bahwa teori analisis feminisme liberal menjadi pisau analisis utama yang layak digunakan untuk membahas isu kesetaraan gender dalam inovasi di sektor pos.

Pertama, nilai kebebasan dalam fenomena ini tentunya telah ditunjukkan melalui upaya yang dilakukan untuk mendorong tingkat peranan perempuan agar berpartisipasi dalam sektor teknologi membantu meningkatkan representasi gender dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif. Kondisi ini juga sejalan dengan nilai feminisme liberal yang menekankan kesetaraan dan inklusivitas. Akses ke internet dan teknologi digital memungkinkan perempuan untuk mengakses informasi dan pengetahuan secara bebas, yang merupakan pondasi penting dalam sektor bisnis pos. Kebebasan tersebut memberdayakan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang karier, kesehatan, dan kehidupan pribadi mereka yang berkenaan dengan konsep feminisme liberal, yang menekankan pentingnya kebebasan individu, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan untuk memilih sendiri pilihan hidupnya.

Kedua, nilai kerja sama dalam hal ini dilihat pada bagaimana teori feminisme liberal yang mengacu pada pandangan positif mengenai sifat manusia yang cenderung berbuat baik dan suka dengan cara-cara kooperatif dalam menyelesaikan masalah sehingga dalam praktiknya akan menghindari terjadinya konflik. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan industri layanan pos dapat menciptakan program dukungan bisnis bagi perempuan yang ingin memulai usaha di bidang teknologi digital. Melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dan regulasi teknologi dapat memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan mereka diperhitungkan. Kerjasama ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil. UPU juga sering mengadakan forum, konferensi, dan diskusi bagi seluruh negara anggota, yang melibatkan perempuan dari berbagai latar belakang dalam sektor teknologi dapat mendorong pertukaran ide dan kolaborasi untuk bersama-sama mengembangkan industri layanan pos.

Ketiga, adapun ketertarikan komunitas internasional terhadap pemberdayaan perempuan dalam teknologi juga dapat dianalisis dengan teori feminisme liberal sebagaimana teori tersebut percaya akan nilai-nilai kemajuan dan modernitas. Tentunya kehadiran teknologi digital seperti robot AI yang dianggap canggih pada masa ini akan menarik perhatian publik di dunia terhadap bagaimana robot tersebut dapat mempengaruhi hidupnya di masa depan jika dibuat dalam jumlah yang lebih banyak dan memenuhi berbagai fungsi yang berbeda-beda. Melalui gagasan-gagasan seperti inilah kecerdasan buatan dapat tetap relevan di dunia kontemporer saat ini dan diperbincangkan terus menerus oleh para pemimpin dunia, pembuat kebijakan, bisnis layanan pos, akademik, hingga masyarakat awam yang percaya akan kemajuan dan modernitas yang harus melibatkan perempuan, sebagaimana perspektif feminisme liberal beranggapan demikian.

Terakhir keempat, terkait nilai kesejahteraan yang diangkat menunjukkan para proponent kecerdasan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari kita akan berpotensi mempermudah berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam sektor bisnis layanan pos. Ketika dunia

berada dalam situasi di mana biaya produksi telah didorong untuk menjadi lebih murah dengan bantuan mesin-mesin modern dan robot AI, maka para pengambil kebijakan akan menganggap bahwa hal tersebut akan secara signifikan mengurangi biaya hidup. Alhasil, mereka percaya bahwa di samping kenyataan yang mengkhawatirkan saat ini dengan bagaimana komunitas internasional memiliki ketakutan berlebihan terhadap kecerdasan buatan yang akan mengambil alih seluruh pekerjaan manusia, hal tersebut dapat dijustifikasi sebagai prekursor peningkatan kesejahteraan di seluruh dunia.

### **Tantangan dan Solusi Keterbatasan Peran Perempuan dalam Industri Pos di Era Digital**

Perempuan menghadapi tantangan besar dalam transformasi digital, terutama karena adanya kesenjangan akses terhadap teknologi (*digital gender gap*). Hambatan ekonomi seringkali membatasi kemampuan perempuan untuk mendapatkan perangkat digital dan konektivitas internet karena perempuan pada umumnya kurang memiliki kemandirian finansial dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan menghadapi kesenjangan pendidikan yang besar dalam literasi dan keterampilan digital. Peran gender tradisional yang memprioritaskan pendidikan laki-laki, khususnya di bidang STEM (*science, technology, engineering, and mathematics*), membatasi peluang perempuan untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk terlibat sepenuhnya dalam transformasi digital (MacKenzie & Wajcman, 1999). Sementara program-program pelatihan yang sudah ada mungkin tidak dapat diakses karena kendala logistik seperti waktu, lokasi, atau biaya (UNESCO, 2023).

Hambatan budaya dan sosial juga memainkan peran penting dalam melanggengkan kesenjangan gender digital. Norma dan stereotip masyarakat sering kali membuat perempuan enggan berkarir di bidang teknologi sehingga memperkuat persepsi bahwa teknologi adalah *domain* atau ranah laki-laki. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang mengintimidasi perempuan dan membatasi partisipasi mereka dalam inisiatif transformasi digital (Pinch & Bijker, 1984). Selain itu, tanggung jawab perempuan yang tidak proporsional terhadap tugas-tugas rumah tangga dan pengasuhan anak semakin membatasi kemampuan mereka untuk terlibat dalam peluang pengembangan profesional (Wajcman, 2010).

Di bidang profesional, perempuan kurang terwakili dalam pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi dan posisi kepemimpinan, sehingga menciptakan siklus di mana lebih sedikit perempuan yang terjun ke bidang tersebut dan melanggengkan kesenjangan gender dalam proses transformasi digital. Di samping itu, bias implisit dalam praktik rekrutmen dan promosi semakin merugikan perempuan, sehingga menyulitkan mereka untuk memajukan karir mereka di sektor digital (Oudshoorn, Rommes, & Stienstra, 2004).

Dalam industri pos, tantangan-tantangan umum ini semakin diperburuk oleh permasalahan-permasalahan yang spesifik pada sektor tertentu. Industri pos, sebagai sektor tradisional, seringkali menunjukkan tingkat adopsi teknologi baru yang lebih lambat. Hal ini dapat merugikan perempuan yang mungkin sudah tertinggal dalam literasi digital dan pemahaman terhadap teknologi baru. Upaya digitalisasi layanan pos mungkin tidak memprioritaskan peningkatan keterampilan pegawai perempuan, sehingga memperburuk kesenjangan yang ada (UNESCO, 2023).

Perempuan di industri pos pada umumnya harus berperan dalam kegiatan operasional yang melibatkan pekerjaan manual dan operasional logistik, yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki. Seiring dengan kemajuan transformasi digital di bidang-bidang ini, terdapat risiko bahwa perempuan mungkin tersingkir dari peran yang lebih teknis dan manajerial dalam berbagai industri (MacKenzie & Wajcman, 1999). Kurangnya keterwakilan dalam peran di tingkat yang lebih tinggi berarti bahwa perspektif dan kebutuhan perempuan sering kali diabaikan dalam perencanaan dan implementasi inisiatif digital. Posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam industri pos juga didominasi oleh laki-laki sehingga hal ini dapat menyebabkan kurangnya kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam transformasi digital. Tidak adanya perempuan dalam peran yang berpengaruh

berarti bahwa inisiatif untuk mendorong literasi digital dan kebijakan kerja fleksibel yang dapat menguntungkan perempuan mungkin tidak diprioritaskan secara memadai (Oudshoorn, Rommes, & Stienstra, 2004).

Perempuan di industri pos sering kali menempati posisi terdepan dalam pelayanan pelanggan, yang berpotensi sama sekali tidak menyajikan peluang yang sama untuk meningkatkan keterampilan digital dan kemajuan karier dibandingkan posisi teknis atau manajerial. Hal ini kemudian membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan manfaat dari inisiatif transformasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi backend dan operasional (Wajcman, 2010).

Maka untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan multifaset yang mencakup peningkatan akses terhadap teknologi, menyediakan program pelatihan yang ditargetkan, menentang norma dan stereotip masyarakat, dan memastikan keterwakilan yang setara dalam peran kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Dengan memasukkan perspektif dan kebutuhan perempuan ke dalam strategi transformasi digital, industri pos yang semula sangat tradisional dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil yang menguntungkan seluruh karyawan dan meningkatkan efisiensi dan inovasi secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Isu pemberdayaan perempuan di era digital menjadi salah satu fenomena feminisme liberal yang mengubah pandangan masyarakat terhadap robot yang selazimnya bertampang mekanik dan ukuran besar menjadi suatu inovasi yang memiliki kecerdasan yang hampir setara dengan manusia dengan lebih praktis dan ringan. Menjamurnya kepopuleran teknologi digital dalam sektor bisnis ditunjukkan melalui presensi robot yang menggantikan tenaga manusia di berbagai kesempatan sebagai salah satu inovasi manusia yang dapat dibanggakan. Namun, beberapa pembicaraan mengenai perkembangan teknologi tersebut menuai diskusi dari masyarakat, seperti hilangnya kesempatan untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada, terkhususnya perempuan dalam sektor bisnis. Dari perspektif feminisme liberal, keberadaan teknologi digital memang memudahkan pekerjaan manusia dengan teknologi kecerdasan buatan dan mengurangi biaya produksi manusia, yang dapat menjadi faktor yang menjustifikasi kekaguman komunitas global atas teknologi tersebut. Dengan menggunakan pisau analisis teori feminisme liberal, penulis dapat melihat bahwa teknologi digital memiliki potensi besar untuk memberdayakan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender. Namun, realisasi potensi ini memerlukan komitmen untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada melalui kebijakan inklusif, pendidikan, dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan.

Dengan pendekatan yang holistik dan sadar gender, teknologi digital dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Partisipasi dan pengambilan keputusan perempuan secara penuh dan efektif dalam kehidupan publik, serta penghapusan kekerasan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan harus terus menerus diperjuangkan. Ketika lebih banyak perempuan berada dalam posisi pengambilan keputusan, maka keputusan yang diambil akan lebih inklusif, suara-suara yang berbeda akan didengar dan solusi-solusi yang berbeda akan tercipta (UPU, 2021). Namun, perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender masih panjang. Saat ini, hanya ada 22 negara yang dipimpin oleh perempuan sebagai kepala negara atau pemerintahan. Melihat tingkat kemajuan dan peranan teknologi digital dalam kehidupan manusia saat ini, diperlukan waktu 130 tahun untuk mencapai kesetaraan gender di tingkat kepala pemerintahan (UPU, 2021). Sektor bisnis layanan pos memainkan peran penting dalam memberdayakan perempuan. Transformasi digital dan inovasi teknologi di industri ini telah menciptakan berbagai peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dan berkembang dalam lingkungan kerja yang semakin inklusif dan dinamis. Sektor bisnis layanan pos dalam era digital tidak hanya mengadaptasi teknologi untuk efisiensi operasional tetapi juga berperan aktif dalam memberdayakan perempuan. Dengan menciptakan peluang kerja yang fleksibel, menyediakan akses ke

pendidikan dan pelatihan, mendukung kepemimpinan perempuan, dan mempromosikan kewirausahaan, sektor pos membantu mendorong kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi digital sebagai langkah penting menuju pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- (2023b). *UPU Policy on Gender Equality and Empowerment of Women*, 1–11.
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2014). *The globalization of world politics: An introduction to international relations*. Oxford University Press.
- Corredera, D. N., & Leta, T. B. (2019). *The digital economy and digital postal activities – a global panorama*. Universal Postal Union.
- Devetak, R., Burke, A., & George, J. (2012). *An introduction to international relations*. Cambridge University Press.
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (Eds.). (2013). *International Relations Theories*. Oxford University Press.
- Empowering women in the digital age*. (2018). . OECD.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, 21, 33–54.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiayati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. June 17, 2024,
- Gender equality and women's and girls' autonomy in the digital era*. (2023). . United Nations.
- Hasanah, H. (2016). *TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*, 8, 21–46.
- Heywood, A. (2011). *Global politics*. Palgrave Macmillan.
- International Women's day 2021: Choose to challenge*. Home. (n.d.-a). <https://www.upu.int/en/news/2021/3/international-womens-day-2021-choose-to-challenge>
- Interview: Building inclusive digital society in Viet Nam*. Home. (n.d.-a). <https://www.upu.int/en/Newsletter/Interview-Building-inclusive-digital-society-in-Viet-Nam>
- Jackson, R. H., & Sørensen, G. (1999). *Introduction to International Relations*. Oxford University Press.
- Kambandu, M., & Manduwi, N. (2022). *Are Malawi's women struggling to break into the digital innovation sector?* UN Capital Development Fund (UNCDF). <https://www.uncdf.org/article/7574/are-malawis-women-struggling-to-break-into-the-digital-innovation-sector>
- Liberal feminism. (n.d.). [https://igg-geo.org/wp-content/uploads/2021/08/IGG\\_CCottais\\_Liberal\\_feminism2020.pdf](https://igg-geo.org/wp-content/uploads/2021/08/IGG_CCottais_Liberal_feminism2020.pdf)
- Martínez-Peláez, R., Ochoa-Brust, A., Rivera, S., Félix, V. G., Ostos, R., Brito, H., Félix, R. A., & Mena, L. J. (2023). Role of digital transformation for achieving sustainability: mediated role of stakeholders, key capabilities, and technology. *Sustainability*, 15(14), 11221. <https://doi.org/10.3390/su151411221>
- Maulana, A. M. R., Farhah, Yahya, Y. K., & Syifa, N. A. (2021). *Liberal Feminism: From Biblical Tradition to the Emergence of CEDAW*, 243–254. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.9521>
- Mevia, F. A. (2022). *AN ANALYSIS OF WOMEN'S AUTONOMY OF FEMALE CHARACTER ON JENNIFER MAKUMBI'S THE FIRST WOMAN: LIBERAL FEMINISM THEORY*, i–50.
- Osmond, J. (2013). *Women at Post Office Telecomms*, 1–32.
- Oudshoorn, N., Rommes, E., & Stienstra, M. (2004). Configuring the user as everybody: gender and design cultures in information and communication technologies. *Science, Technology & Human Values/Science, Technology, & Human Values*, 29(1), 30–63. <https://doi.org/10.1177/0162243903259190>
- Pinch, T. J., & Bijker, W. E. (1984). The Social Construction of Facts and Artefacts: or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology might Benefit Each Other. *Social Studies of Science*, 14(3), 399-441. <https://doi.org/10.1177/030631284014003004>

- Posts prioritize cybersecurity at UPU Forum.* Home. (n.d.-a).  
<https://www.upu.int/en/news/2024/april/posts-prioritize-cybersecurity-at-upu-forum>
- Rao, S. (2015). *GENDER AND FINANCIAL INCLUSION THROUGH THE POST*. Universal Postal Union/UN Woman.
- SIDS focus on inclusive digital development.* Home. (n.d.-a).  
<https://www.upu.int/en/news/2024/march/sids-focus-on-inclusive-digital-development>
- Suarmini, N. W., Zahrok, S., & Agustin, D. S. Y. (n.d.). *PELUANG DAN TANTANGAN PERAN PEREMPUAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0*, 48–53.
- Swiss Post annual report 2023 - Swiss post - annual report 2023*. Post AR 23 - Annual Business Report 2023. (n.d.). <https://geschaeftsbericht.post.ch/23/ar/en/how-swiss-post-is-improving-its-services-thanks-to-digitization>
- UNESCO. (2023). *Does Artificial Intelligence advance gender equality?*  
<https://www.unesco.org/en/articles/does-artificial-intelligence-advance-gender-equality>
- Universal Postal Union (UPU). (2023). *UPU Policy on Gender Equality and Empowerment of Women*, 1–11.
- Universal Postal Union. (2024, April 2). *The UPU and its member countries celebrate women's achievements through history*. Home. <https://www.upu.int/en/news/2024/march/the-upu-and-its-member-countries-celebrate-womens-achievements-through-history>
- UPU sets the tone: Building an inclusive and diverse postal sector*. Home. (n.d.-b).  
<https://www.upu.int/en/news/2024/march/upu-sets-the-tone-building-an-inclusive-and-diverse-postal-sector>
- Wahyudi, D., & Kurniasih, N. (2021). *NARASI PEREMPUAN DAN LITERASI DIGITAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0*, 3, 1–19.
- Wajcman, J. (2010). Feminist theories of technology. *Cambridge Journal of Economics*, 34(1), 143–152. <http://www.jstor.org/stable/24232027>
- Williams, R., & Edge, D. (1996). The social shaping of technology. *Research Policy*, 25(6), 865–899. [https://doi.org/10.1016/0048-7333\(96\)00885-2](https://doi.org/10.1016/0048-7333(96)00885-2)
- Women-led Digital Tech start-ups take center stage at La Poste France*. Home. (n.d.-f).  
<https://www.upu.int/en/news/2022/6/womenled-digital-tech-startups-take-center-stage-at-la-poste-france>

## BIOGRAFI

**Ryani Abigail Silalahi** merupakan mahasiswa semester 6 Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran yang tertarik terhadap isu diplomasi, terkhususnya pada kawasan ASEAN.

**Windy Dermawan** merupakan dosen tetap Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Hirauan kajian pada paralel diplomasi dan aktor non-negara dalam diplomasi.

**Meta Lestiana Devi** merupakan pegawai PT Pos Indonesia yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu logistik internasional.